

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembangunan Ekonomi**

##### **1. Konsep Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Pembangunan ekonomi juga bisa diartikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi.<sup>18</sup>

Lalu perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih

---

<sup>18</sup> Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 1-2

bersifat kualitatif, bukan hanya dari penambahan produksi, akan tetapi juga dari perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input dari berbagai sektor perekonomian misalnya lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik.

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan pendapatan secara total dan maksimal, pendapatan perkapita penduduk dengan memperhitungkan bertambahnya penduduk serta adanya perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Secara ringkas, pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu penduduk dalam sebuah negara meningkat dalam jangka waktu yang panjang.<sup>19</sup> Ada tiga hal yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu:

a) Pembangunan sebagai suatu proses

Yang berarti bahwa pembangunan adalah suatu tahap yang harus dijalani dan dilalui oleh setiap masyarakat atau bangsa.

b) Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Maksudnya ialah pembangunan merupakan salah satu tindakan positif atau suatu usaha yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam meningkatkan pendapatan perkapita. Oleh karenanya, peran serta masyarakat, pemerintah, juga semua elemen dalam suatu negara untuk berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi dalam sebuah proses pembangunan sangat dibutuhkan.

c) Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Dalam suatu perekonomian bisa dikatakan berkembang jika pendapatan perkapita dalam jangka panjang lebih cenderung meningkat. Namun bukan berarti bahwa pendapatan perkapitanya

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 2

harus selalu mengalami kenaikan secara terus menerus. Contohnya, jika dalam sebuah negara terjadi suatu musibah bencana alam ataupun lainnya, maka negara tersebut akan mengalami kemunduran perekonomian. Tetapi yang terpenting adalah kegiatan atau usaha dalam mengembangkan ekonominya rata-rata selalu meningkat pada setiap tahunnya.<sup>20</sup>

## 2. Tahap Pembangunan Ekonomi

Ahli ekonomi W.W Rostow membagi lima tahap pembangunan ekonomi, yaitu:

### a. Tahap Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Masyarakat tradisional menurut Rostow adalah masyarakat yang masih menggunakan cara produksi “primitif” dan masih dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun dengan cara pemikiran yang tradisional. Pada masyarakat tradisional, tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih terbatas, karena sebagian besar bersumber dari sektor pertanian. Struktur sosial masyarakat tradisional masih bersifat hierarki, sehingga menyebabkan anggota masyarakat sulit untuk mengadakan perubahan vertikal dalam struktur sosial.

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan ciri penting dalam suatu masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonomi. Apabila perubahan telah terjadi seperti yang disebutkan dan dapat menyebabkan pertumbuhan, maka masyarakat tersebut dapat dianggap telah memasuki tahap prasyarat lepas landas.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>21</sup> Abdul Rachim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hal. 10

b. Tahap Prasyarat Untuk Lepas Landas (*The Pracondition For Take Off*)

Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai masa transisi suatu masyarakat untuk mempersiapkan diri mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan agar terus berkembang (*self sustained growth*). Pada tahap sesudah prasyarat lepas landas, pertumbuhan ekonomi akan berlalu secara otomatis.

Tahap prasyarat lepas landas terbagi dalam dua kelompok besar, pertama, tahap prasyarat lepas landas yang telah dicapai oleh negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, serta tahap yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Kedua adalah tahap prasyarat lepas landas yang dicapai oleh negara-negara yang *born free* (menurut Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, di mana negara-negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional.

Tahap prasyarat lepas landas dalam bidang ekonomi terjadi akibat meningkatnya jumlah tabungan masyarakat. Meningkatnya jumlah tabungan masyarakat/modal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini, perubahan pertumbuhan ekonomi meliputi pertama, perubahan masyarakat dalam menggunakan ilmu pengetahuan modern dan melakukan penemuan baru untuk tujuan menurunkan biaya produksi, kedua, terdapat pula golongan masyarakat yang bersedia menciptakan produksi dan tingkat produktivitas, ketiga, sebagian masyarakat harus bersedia mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk pekerjaan di sektor industri dengan disiplin kerja yang tinggi.<sup>22</sup>

c. Tahap Lepas Landas (*The Take Off*)

Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 11

dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan per kapita semakin besar.

Rostow mengemukakan 3 ciri utama negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu:

- 1) Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari Produk Nasional Bersih (*Net National Product=NNP*).
  - 2) Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.
  - 3) Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.
- d. Tahap Gerakan Kedewasaan (*The Drive to Maturity*)

Setelah masyarakat mengalami fase lepas landas muncul perkembangan industrialisasi yang besar. Perkembangan industri ini bukan hanya barang konsumsi tetapi juga barang modal. Zaman konsumsi massal yang tinggi, zaman perkembangan ini masyarakat mengalami kenaikan pendapatan. Sehingga, yang terjadi konsumsi untuk kebutuhan bukan hanya berpusat pada kebutuhan pokok namun pada konsumsi kebutuhan yang tahan lama. Pada tahapan ini, pembangunan yang terjadi mengalami kesinambungan secara terus menerus. Teori ini berdasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern.

- e. Tahap Masa Konsumsi Tinggi (*The High Consumption*)

Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat

telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi. Pada tahap konsumsi tinggi ini ada tiga macam tujuan dari masyarakat (negara), yaitu:

- 1) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.
- 2) Menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif.
- 3) Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

### **3. Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi di suatu negara diarahkan pada pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Melalui berbagai program kegiatan yang dijalankannya, berbagai sumber daya ekonomi yang ada dapat diolah sedemikian rupa sehingga memberikan nilai tambah terhadap sumber daya yang ada. Pengolahan sumber daya ini merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan yang dijalankan. Masih banyak elemen lain yang sangat terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Peranan kelembagaan dapat menjadi faktor penguat dalam pelaksanaan pembangunan. Aspek kelembagaan tersebut tersedia dalam ranah kehidupan masyarakat. Melalui kekuatan dalam bidang kelembagaan tersebut masyarakat dapat melaksanakan pembangunan ekonominya sesuai dengan ciri lokalitas yang dimilikinya.

Namun, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu negara, akan banyak dihadapkan pada berbagai tantangan yang ada. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi ini sifatnya dinamis dan membutuhkan berbagai cara agar dapat mengatasi tantangan

yang ada dengan baik. Dalam hal ini berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di suatu negara meliputi:

a) Perkembangan Lingkungan Global

Era liberalisasi dan globalisasi telah menjadi roh baru dalam pembangunan ekonomi pada era modern dewasa ini. Liberalisasi dan globalisasi telah menjadi budaya dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya permintaan terhadap berbagai barang dan jasa menjadi semakin meningkat seiring dengan perubahan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang diinginkannya. Kecepatan perubahan dalam lingkungan eksternal ini apabila tidak dapat diatasi dengan baik justru akan semakin mendorong tingkat konsumsi yang semakin besar terhadap barang-barang impor. Kenaikan impor ini apabila tidak dapat dikendalikan justru akan dapat mendorong kenaikan defisit neraca perdagangan suatu negara.

Selain itu pula, era liberalisasi dan globalisasi dunia telah menyebabkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi semakin kabur. Sebagai akibatnya arus lalu lintas dalam hal barang dan jasa semakin bebas bergerak. Sebagai konsekuensinya, krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan cepat menjalar ke negara lainnya (*contagion effect*). Ketidakmampuan negara dalam menjaga fundamental perekonomiannya akan menyebabkan negara tersebut semakin rentan dengan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di negara lain.

b) Perkembangan Teknologi

Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam perkembangannya, keberadaan teknologi telah menjadi bagian terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Melalui teknologi, pelaksanaan pembangunan menjadi semakin intensif dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat.

Teknologi dapat dihasilkan melalui kegiatan inovasi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Dewasa ini perkembangan teknologi telah menyentuh pada berbagai aspek kehidupan manusia.

Salah satu prasyarat dalam penguasaan teknologi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia. Ketidakmampuan suatu negara dalam mengembangkan kualitas sumber dayanya, maka negara tersebut akan mengalami kerugian dalam upaya untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan (jalur formal dan jalur non formal) dan penyediaan sarana prasarana pendukung dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

c) Kerusakan Lingkungan

Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara besar-besaran, jika tidak diimbangi dengan keberpihakan terhadap lingkungan justru akan menghancurkan pembangunan itu sendiri. Dewasa ini, perkembangan ekonomi yang ada di berbagai negara dunia sebagian besar ditopang oleh kegiatan di sektor industri. Sektor industri menjadi sektor yang mengolah berbagai sumber daya ekonomi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang dibutuhkan oleh konsumen.

Namun demikian di banyak negara, pengembangan industri dalam negeri tidak diimbangi secara optimal pada aspek pemeliharaan lingkungan hidup bagi kehidupan ekosistem yang ada. Masih banyak dijumpai dalam kegiatan di sektor industri. Limbah usaha dibuang secara bebas ke sungai, laut, dalam tanah hingga ke udara tanpa melakukan proses pengolahan limbah yang memadai. Sebagai akibatnya terjadi paralelisme antara perkembangan ekonomi, perkembangan sektor industri dan kerusakan lingkungan hidup. Hal

ini tentunya bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

d) Konflik Antar Negara

Sebagai negara yang hidup pada era global, maka berbagai peristiwa yang terjadi di luar negara akan dapat dengan cepat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara lain. Salah satu tantangan yang ada dalam konstelasi pembangunan di era modern ini adalah munculnya konflik antar negara. Konflik yang terjadi manakala tidak dapat dikendalikan dengan baik justru akan menyebabkan peperangan yang justru dapat menghancurkan pembangunan itu sendiri. Konflik ini biasa terjadi manakala terdapat perbedaan pandangan mengenai batas wilayah dan kepemilikan terhadap sumber daya ekonomi. Eskalasi konflik akan semakin meluas manakala tidak ada kepastian dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah kebijakan yang tepat dalam mengatasi dinamika yang terjadi dengan tetap mengutamakan kemakmuran rakyat.

e) Konflik Antar Penduduk Lokal

Keberlanjutan pembangunan ekonomi juga akan ditentukan oleh semangat persatuan dan kesatuan masyarakat. Persatuan dan kesatuan ini menjadi penguat dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi. Konflik antar penduduk lokal ini dapat terjadi dikarenakan adanya persoalan pemerataan pembangunan, batas wilayah, pemekaran wilayah hingga persoalan sosial budaya lainnya. Ketidakmampuan negara dalam menjaga stabilitas domestik ini akan dapat berdampak pada semakin meningkatnya tensi hubungan sosio kemasyarakatan yang berkembang di masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), hal. 5-8

#### **4. Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Atau definisi pertumbuhan ekonomi yang lainnya adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu misalnya dalam satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>24</sup>

#### **5. Hubungan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian adalah sasaran dari pembangunan, atau dengan kata lain output dari pembangunan adalah perekonomian, yang dalam pandangan klasik disebut dengan kemakmuran. Melalui upaya pembangunan maka persoalan ekonomi dapat diselesaikan. Semuanya

---

<sup>24</sup> Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan.....*, hal. 6-7

menjadi agenda yang harus dicermati, karena terkait dengan tujuan pembangunan yaitu memberantas kemiskinan dan menjembatani kesenjangan.

Kemiskinan dan kesenjangan memiliki akar masalah kemakmuran dan keadilan maka pembangunan akhirnya disamping berdimensi ekonomi juga berdimensi sosial. Penderitaan dan kemiskinan bukan hanya disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, tetapi juga kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja dan pengembangan diri, akses pada informasi serta peluang untuk turut serta mengambil bagian dalam proses kemasyarakatan dan bahkan kehidupan kenegaraan.

Untuk memahami perekonomian dan pembangunan tentu saja relevan untuk melacak konsep ekonomi pembangunan. Menurut ahli bernama Bell, ekonomi pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mengkaji aspek-aspek ekonomi proses pembangunan pada negara-negara yang berpendapatan rendah. Fokus ekonomi pembangunan bukan hanya pada metode-metode peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural, tetapi juga pada perbaikan potensial bagi populasi secara massal.

Dari pendapat di atas, maka ekonomi pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara nyata oleh negara dalam mensejahterakan rakyatnya melalui berbagai kebijakan dan program yang ditentukan. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dalam arti luas yang mencakup pengendalian inflasi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan. Kebijakan dan program yang bertujuan memberikan/menyediakan layanan kepada publik yang mencakup pembangunan jalan raya dan berbagai fasilitas dan pelayanan publik yang diperuntukkan bagi semua golongan masyarakat tanpa terkecuali.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 16-17

## 6. Kemiskinan dalam Pembangunan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.<sup>26</sup> Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.<sup>27</sup>

Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional.

Konsep kemiskinan bersifat banyak sisi. Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan Alamiah; merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang

---

<sup>26</sup> Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 3

<sup>27</sup> bps.go.id, diakses pada 18 Juli 2020

- produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian.
- b. Kemiskinan Kultural; merupakan kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat.
  - c. Kemiskinan Struktural; merupakan kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.<sup>28</sup>

Sedangkan untuk penyebab kemiskinan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan, yaitu:

- a) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang

---

<sup>28</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan.....*, hal. 9-10

seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.

- b) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
- c) Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.
- d) Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan.....*, hal. 12-13

## 7. Strategi Mengatasi Kemiskinan

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi lima hal antara lain:

- a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
- b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
  - 1) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
  - 2) Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.
  - 3) Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro.
  - 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
  - 5) Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.
  - 6) Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
  - 7) Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
- c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain:

- 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.
  - 2) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
  - 3) Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.
  - 4) Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
- d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
- e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.<sup>30</sup>

Berikut ini adalah beberapa program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

- 1) Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
- 2) Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- 3) Tetap mempertahankan program lama seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), RASKIN (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan sebagainya.
- 4) Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
- 5) Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah.
- 6) Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan.
- 7) Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin.
- 8) Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan.

---

<sup>30</sup> Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan.....*, hal. 145-146

- 9) Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
- 10) Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
- 11) Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi.
- 12) Percepatan pembangunan infrastruktur.
- 13) Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
- 14) Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pedesaan.
- 15) Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik.
- 16) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- 17) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).<sup>31</sup>

## **B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan.

Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam Bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam 2 (dua) arti yaitu:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 148-149

- a) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu;
- b) *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.

Semenjak tumbuhnya pengakuan bahwa manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam pembangunan, maka dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan bukan merupakan hal baru tetapi sudah sering digaungkan.

Berkaitan dengan begitu pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting untuk mendapat perhatian seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Wasistiono dalam bukunya mengutip pernyataan Carlzon dan Macauley yang menjelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.”

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “*empowerment*” menurut para ahli lain, pada intinya diartikan sebagai berikut: “membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan.”<sup>32</sup>

Pemberdayaan ditujukan bagi kemampuan seseorang, khususnya untuk kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menunjukkan sumber-sumber produktif

---

<sup>32</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 1-2

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan.<sup>33</sup>

Jadi, bisa dikatakan pemberdayaan adalah suatu proses dan cara yang dilakukan agar memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri sesuai keinginan. Inti dari pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Artinya, pemberdayaan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, tetapi masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas juga dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.<sup>34</sup>

## 2. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat sudah banyak dikemukakan oleh para pakar ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang di luar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama. Selain itu ahli lain mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya bersama.

Berdasarkan pengertian-pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

Adam Smith mengemukakan, bahwa sebuah masyarakat dapat terdiri dari berbagai jenis manusia yang berbeda, yang memiliki fungsi yang berbeda (*as among different merchants*), yang terbentuk dan dilihat hanya dari segi fungsi bukan dari rasa suka maupun cinta dan sejenisnya, dan hanya rasa untuk saling menjaga agar tidak saling menyakiti “*may*

---

<sup>33</sup> Rosnida Sari, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata (Meneropong Usaha Penginapan Masyarakat Lokal dan Manca Negara di Desa Mon Ikeun Lhoknga)*, Jurnal Al-Bayan, Vol. 22 No. 34 Tahun 2016, hal. 55

<sup>34</sup> Bayu Dwi Prasetya, *Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Air Tawar (Studi Kasus di Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Lestari Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 11-12

*subsist among different men, as among different merchants, from a sense of its utility without any mutual love or affection, if only they refrain from doing injury to each other.”*

Masyarakat menurut Linton adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Menurut M.J. Heskovits, masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup (*the way of life*) tertentu. Kemudian, menurut S.R. Steinmentz, masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai hubungan erat dan teratur.

Ahli dari Indonesia, yaitu Selo Soemardjan memberikan pengertian masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat menurut Max Weber adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.<sup>35</sup>

### **3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi rakyat adalah suatu upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar masyarakat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Subejo dan Supriyanto memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal

---

<sup>35</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan.....*, hal. 2-3

yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang.<sup>36</sup>

Dwidjowijoto mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengandung dua pengertian yaitu: (1) memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; dan (2) usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pihak lain yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada seseorang, namun juga sekelompok orang. Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kelembagaan, baik lembaga kemasyarakatan desa, maupun lembaga fungsional, lembaga perekonomian yang ada di desa. Lembaga yang sehat dan kuat menjadi modal utama dalam mengembangkan sumber daya manusia, karena melalui kelembagaan proses pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif.

Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Winarni mengemukakan pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika

---

<sup>36</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 23

asumsi ini berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>37</sup>

Pemberdayaan erat kaitannya dengan pembangunan, dimana pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan otonomi daerah yang melekatkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.<sup>38</sup>

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi, pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 24

<sup>38</sup> I Nyoman Sumayadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2005), hal. 66

<sup>39</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan.....*, hal. 8

#### 4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

##### a) Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

##### b) Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

c) Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.<sup>40</sup>

d) Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e) Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Di antaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f) Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik,

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 9

sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>41</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip, yaitu:

### a) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

### b) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 10-11

mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.<sup>42</sup>

c) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*).

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Dalam kaitan ini diharapkan pihak pendamping melakukan apa yang digambarkan dalam peribahasa sebagai berikut: “Pihak yang melakukan upaya pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan memberikan pengetahuan bagaimana cara memancingnya”. Dengan demikian, individu dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dan tidak tergantung kepada pihak mana pun.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal 11

d) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.<sup>43</sup>

## 6. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini, ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b) Tahap Pengkajian

Tahapan ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 12

sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

c) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.<sup>44</sup>

d) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

e) Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik

---

<sup>44</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan.....*, hal. 13

melenceng saat di lapangan. Pada tahap ini agar seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sasarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

f) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

g) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.<sup>45</sup>

## 7. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Ada lima strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 13-14

a) Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

b) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

c) Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d) Mobilisasi sumber daya

Untuk memobilisasi sumber daya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e) Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan memertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.<sup>46</sup>

## C. Budidaya Ikan Patin

### 1. Pengertian Budidaya Ikan

Perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Berdasarkan Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004 atau revisi Undang-Undang Perikanan No. 45 tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

---

<sup>46</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 170

Budidaya perikanan atau akuakultur secara umum adalah memelihara biota perairan untuk tujuan konsumsi, pembenihan, hiburan yang dikelola secara komersial atau diperdagangkan. Sisi lain pengertian akuakultur adalah campur tangan manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya.<sup>47</sup>

Dalam arti sempit, budidaya perikanan adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup di alam menjadi ikan peliharaan. Sedangkan dalam arti luas, budidaya perikanan adalah semua usaha membesarkan dan memperoleh ikan, baik ikan yang masih hidup liar di alam atau sudah dibuatkan tempat tersendiri dengan adanya campur tangan manusia. Tujuan dari budidaya perikanan itu sendiri tentunya untuk mendapatkan ikan yang lebih baik dan lebih banyak untuk memenuhi permintaan terhadap ikan dari masyarakat yang saat ini semakin meningkat.<sup>48</sup>

Sedangkan definisi pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah “kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”<sup>49</sup>

## 2. Karakteristik Ikan Patin

Ikan patin memiliki bahasa latin yaitu *Pangasius pangasius*. Ikan patin memiliki badan memanjang berwarna putih seperti perak dan punggung berwarna kebiru-biruan. Panjang tubuhnya bisa mencapai 120 cm dan ikan ini tidak memiliki sisik. Kepala patin relatif kecil dengan mulut terletak di ujung kepala agak di sebelah bawah. Pada sudut

---

<sup>47</sup> Mochammad Farchan dan Mugi Mulyono, *Dasar-Dasar Budidaya.....*, hal. 3

<sup>48</sup> Tim Penulis PS, *Agribisnis Perikanan Edisi Revisi*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2008), hal. 31-32

<sup>49</sup> Mochammad Farchan dan Mugi Mulyono, *Dasar-Dasar Budidaya.....*, hal. 3

mulutnya terdapat dua pasang kumis pendek yang berfungsi sebagai peraba.

Sirip punggung memiliki sebuah jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang bergerigi dan besar di sebelah belakangnya. Sementara itu, jari-jari lunak sirip punggung terdapat enam atau tujuh buah. Pada punggungnya terdapat sirip lemak yang berukuran kecil sekali. Sirip ekornya membentuk cagak dan bentuknya simetris.<sup>50</sup>

Selain patin, ikan ini juga memiliki nama lokal yaitu jambal dan pangasius. Sementara itu, untuk nama Inggrisnya adalah *catfish* alias ikan kucing karena ikan patin memiliki kumis. Di Pulau Sumatera, terutama Riau, jenis yang terkenal adalah patin kunyit yang banyak ditangkap di sungai-sungai. Di Pulau Jawa ada yang dikenal sebagai patin jambal, yang selain ditemukan di beberapa sungai besar juga terdapat di waduk-waduk.

Sebagaimana ikan *catfish* lainnya, ikan patin yang hidup di alam bebas biasanya selalu bersembunyi di dalam liang-liang di tepi sungai. Ikan ini baru keluar dari liang persembunyiannya pada malam hari setelah hari mulai gelap. Di habitat aslinya yaitu sungai-sungai yang besar, ikan ini lebih banyak menetap di dasar perairan daripada di permukaan, sehingga ikan patin digolongkan sebagai ikan dasar (demersal). Hal ini dapat dibuktikan dari bentuk mulutnya yang melebar, sebagaimana mulut ikan-ikan demersal lainnya. Makanan ikan patin di alam antara lain berupa ikan-ikan kecil, cacing, detritus, serangga, udang-udangan, moluska, dan biji-bijian.<sup>51</sup>

Di Indonesia saat ini sedikitnya terdapat dua jenis ikan patin yang populer dan banyak dipelihara di kolam budidaya, yaitu patin lokal dan patin siam. Patin lokal memiliki nama ilmiah *Pangasius pangasius* atau *Pangasius sp.* Patin lokal terdiri dari beberapa jenis. Salah satu jenis

---

<sup>50</sup> Heru Susanto dan Khairul Amri, *Budi Daya Ikan Patin*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2000), hal. 6

<sup>51</sup> Khairuman dan Dodi Sudenda, *Budi Daya Patin Secara Intensif*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2002), hal. 7-8

populer yang berpeluang menjadi komoditas ekspor adalah patin jambal (*Pangasius djambal Bleeker*) yang banyak terdapat di beberapa sungai besar di Indonesia. Jenis lain yang juga populer adalah patin kunyit. Patin kunyit ini banyak ditemukan di sungai-sungai besar di Riau. Jenis ikan patin yang hampir sama dengan patin jambal adalah *P. bocourti* yang merupakan komoditas ekspor ke Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia. Ikan jenis ini banyak ditemukan di perairan umum di Vietnam. Sementara itu, patin siam memiliki nama latin *Pangasius hypthalmus* atau *Pangasius sutchi*. Ikan patin siam biasa juga disebut patin bangkok atau lele bangkok. Sebutan ini muncul tidak hanya karena ukuran tubuhnya yang bongsor layaknya ternak penyandang nama bangkok, tetapi juga lantaran asalnya dari Bangkok (Thailand).<sup>52</sup>

### 3. Budidaya Ikan Patin

Ikan patin merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dan dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah, karena memiliki harga jual yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin banyak diminati oleh para pengusaha. Pada pembudidayaan, ikan patin bisa mencapai panjang 35-40 cm dalam usia enam bulan. Jika ditinjau dari aspek budidaya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk budidaya ikan patin. Untuk budidaya ikan di kolam, maka persyaratannya yaitu sebagai berikut.

#### a) Sumber Air

Air merupakan faktor mutlak dalam kegiatan budidaya patin. Keberhasilan budidaya sangat ditentukan oleh air karena air adalah media hidup ikan patin yang paling utama. Sumber air dapat berasal dari saluran irigasi teknis (buatan), sungai, atau sumber air lainnya. Meskipun ikan patin tidak membutuhkan sumber air yang senantiasa mengalir sepanjang waktu, untuk unit pembenihan satu hal yang harus terpenuhi adalah kondisi airnya harus bersih. Untuk itu, jika

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 9

sulit mendapatkan air irigasi yang baik, sumber airnya dapat diusahakan berupa sumur biasa (sumur pompa).<sup>53</sup>

b) Kualitas Air

Kualitas air penting untuk diperhatikan dalam budidaya patin. Air yang kurang baik dapat menyebabkan ikan mudah terserang penyakit. Ada beberapa variabel yang berhubungan dengan kualitas air. Variabel-variabel tersebut adalah yang berhubungan dengan sifat kimia air (kandungan oksigen, karbondioksida, pH), zat-zat beracun, dan kekeruhan air. Selain memiliki sifat kimia seperti di atas, air juga memiliki sifat-sifat fisika, diantaranya yang berhubungan dengan suhu, kekeruhan, dan warna.

1) Kandungan Oksigen dan Karbondioksida

Dalam bernapas, ikan patin mengisap oksigen dan mengeluarkan karbondioksida. Kandungan oksigen sangat bertentangan dengan kandungan karbondioksida di dalam air. Oksigen yang terlarut di dalam air dapat berasal dari hasil proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, atau berasal dari udara luar melalui proses difusi di permukaan air. Ikan patin termasuk salah satu jenis ikan yang cukup tahan dengan kekurangan oksigen di dalam air. Apabila kandungan oksigen di dalam air kurang, ikan patin akan mengambil langsung oksigen di udara bebas. Pada usaha intensif, kandungan oksigen yang baik minimal 4 mg/liter air, sedangkan kandungan karbondioksida kurang dari 5 mg/liter air.

2) Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman atau pH (*puissance of the H*) merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen yang menunjukkan suasana asam atau basa suatu perairan. Derajat keasaman suatu perairan dipengaruhi oleh konsentrasi karbondioksida dan senyawa yang bersifat asam. Nilai pH adalah antara 1 – 14, dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 12

angka 7 merupakan pH normal. Umumnya pada siang hari pH suatu perairan meningkat karena berlangsungnya proses fotosintesis. Sebaliknya, pada malam hari kandungan pH suatu perairan akan menurun karena tanaman air dan fitoplankton mengonsumsi oksigen dan menghasilkan karbondioksida. Derajat keasaman yang baik untuk budidaya patin adalah antara 5 – 9.<sup>54</sup>

### 3) Zat Beracun

Salah satu zat beracun di dalam air yang berbahaya bagi kehidupan ikan patin adalah amoniak. Gas yang berbau sangat menusuk ini dapat berasal dari proses metabolisme ikan atau proses pembusukan bahan organik yang dilakukan oleh bakteri. Amoniak merupakan racun bagi ikan. Biasanya muncul apabila fitoplankton banyak yang mati kemudian diikuti oleh penurunan pH karena kandungan karbondioksida meningkat. Batas konsentrasi kandungan amoniak yang dapat mematikan kehidupan ikan patin adalah antara 0,1–0,3 mg/liter air.

### 4) Kekeruhan

Kekeruhan dapat disebabkan oleh berbagai partikel, seperti lumpur, bahan organik, sampah, atau plankton. Kekeruhan yang baik adalah yang disebabkan oleh plankton. Kekeruhan dapat mempengaruhi cahaya matahari yang masuk ke dalam air.

### c) Kuantitas Air

Kuantitas air adalah jumlah air yang diperlukan untuk mengairi suatu unit perkolaman atau lebih populer dengan sebutan debit air. Jumlah air yang dibutuhkan untuk setiap sub sistem dalam budidaya patin berbeda-beda. Menentukan debit air dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan meletakkan ember di pintu air yang masuk

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 13

ke dalam kolam. Catat berapa waktu yang diperlukan sampai ember tersebut penuh. Dengan cara ini akan diketahui debit air tersebut, yaitu volume air di ember dibagi dengan waktu (menit/detik), misalnya 0,5 liter/detik atau 10 liter/menit.

Secara tidak langsung dapat dilakukan pada saluran air yang akan masuk ke kompleks perkolaman. Pertama-tama tentukan jarak saluran, lalu ukur lebar rata-rata saluran dan tinggi rata-rata air pada saluran tersebut. Siapkan pelampung dan lepaskan di hulu saluran. Setelah pelampung dilepaskan, hitung berapa detik atau menit waktu yang diperlukan pelampung untuk sampai pada jarak yang telah ditentukan semula. Dengan demikian akan dapat diketahui debit air saluran. Rumus menghitungnya: lebar saluran x kedalaman air x panjang saluran yang diukur : waktu.

d) Tanah

Selain air, tanah merupakan faktor mutlak dalam kegiatan budidaya patin, khususnya untuk pendederan dan pembesaran. Dalam membuat unit usaha, kita harus memperhatikan sifat-sifat tanah. Hal pokok yang harus diperhatikan adalah tanah pematang kolam harus kokoh sehingga dapat menahan massa air. Ada beberapa jenis tanah yang dapat dibuat kolam, yaitu tanah liat atau lempung berpasir, tanah terapan, tanah berfraksi kasar, dan tanah berpasir. Tanah liat berpasir sangat mudah dibentuk, tidak mudah pecah, dan tidak melekat di tangan. Untuk tiga jenis tanah terakhir, pematang kolam harus ditembok atau dibeton guna menghindari bocoran.<sup>55</sup>

Sedangkan untuk budidaya ikan dengan jaring apung, penempatan jaring apung di perairan umum dianjurkan di jalur arus horisontal. Umumnya jaring apung diletakkan di daerah muara. Maksudnya agar ikan patin selalu mendapat suplai air serta kandungan oksigen yang terlarut juga tinggi. Selain itu, pergerakan air akan dapat membantu

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 14-16

menghanyutkan sisa-sisa kotoran atau bahan organik. Sebaiknya hindari penempatan jaring apung di perairan luas dan terbuka. Perairan seperti ini memungkinkan terjadinya gelombang dan tiupan angin kencang yang dapat mengancam keamanan jaring apung. Kedalaman air juga harus diperhatikan. Di perairan yang mengalir, kedalaman jaring apung minimal tiga meter. Di perairan yang tidak mengalir jaring apung ditempatkan minimal pada kedalaman lima meter.<sup>56</sup>

Ikan patin akan tumbuh lebih baik di kolam lumpur dengan aliran air yang mengalir cukup baik. Akan tetapi, ikan patin juga bisa dipelihara di kolam semen yang tidak mengalir, tetapi perlu diperhatikan kualitas airnya agar tetap dalam kondisi yang baik. Adapun langkah-langkah dalam pemeliharaan ikan patin adalah sebagai berikut:

1) Pemupukan

Pada kolam lumpur, idealnya perlu dilakukan pemupukan sebelum ikan patin ditebarkan. Tujuan dari pemupukan kolam adalah untuk meningkatkan makanan alami dan produktivitas kolam dengan cara merangsang pertumbuhan makanan alami sebanyak-banyaknya. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau dengan dosis 50-700 gram/m<sup>2</sup>.

2) Pemberian Pakan

Pemberian pakan merupakan faktor yang cukup menentukan dalam budidaya ikan patin. Faktor makanan yang berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya ikan patin adalah dari aspek kandungan gizinya, jumlah, dan frekuensi pemberian makanan. Pemberian makan dilakukan dua kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Jumlah makanan yang diberikan per hari yaitu sebanyak 3-5% dari jumlah berat badan ikan peliharaan. Jumlah makanan selalu berubah tiap bulan, sesuai dengan kenaikan berat badan ikan. Hal ini dapat diketahui dengan cara menimbanginya 5-10 ekor ikan contoh yang diambil dari ikan yang dipelihara (sampel). Pakan yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 17

diberikan adalah pelet dan bisa ditambahkan makanan alami lainnya seperti kerang, keong emas, bekicot, ikan sisa, dan lain-lain. Makanan alami yang diperoleh dari lingkungan selain mengandung protein tinggi juga menghemat biaya pemeliharaan.

### 3) Penanganan Hama dan Penyakit

Pada pembesaran ikan patin di jaring terapung dan kolam, hama yang mungkin menyerang antara lain lingsang, kura-kura, biawak, ular air, dan burung. Cara untuk mencegah masuknya hama tersebut ke kolam adalah dengan memasang lampu penerangan di sekitar kolam. Jika ada sinar lampu, hama tersebut biasanya enggan untuk masuk.

Untuk penyakit pada ikan patin, biasanya ada yang disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Penyakit akibat infeksi biasanya timbul karena adanya gangguan organisme patogen. Sedangkan penyakit non-infeksi adalah penyakit yang timbul akibat adanya gangguan faktor yang bukan patogen. Penyakit non-infeksi merupakan penyakit yang tidak menular.

### 4) Pemanenan Ikan Patin

Meski terlihat sederhana, dalam proses pemanenan ikan patin juga perlu memperhatikan beberapa aspek agar ikan tidak mengalami kerusakan, kematian, ataupun cacat saat dipanen. Panen dilakukan setelah ikan dipelihara selama tiga bulan atau lebih. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada ukuran benih yang ditebarkan, ukuran ikan yang akan ditangkap, dan pemberian pakan tambahan.

Penangkapan ikan sebaiknya tidak menggunakan jala apung karena akan mengakibatkan ikan mengalami luka-luka. Cara yang baik yang seharusnya dilakukan adalah penangkapan ikan dimulai di bagian hilir kemudian bergerak ke bagian hulu. Jadi, jika ikan didorong dengan kere maka ikan patin akan terpojok pada bagian hulu. Pemanenan dengan cara seperti itu tentunya menguntungkan

karena ikan tetap mendapatkan air yang segar sehingga kematian ikan dapat dihindari.<sup>57</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Perdana Kesuma, dengan judul penelitian “Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan”.<sup>58</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan budidaya ikan air tawar, untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan budidaya ikan air tawar, mengetahui hambatan dan keberhasilan yang dicapai oleh kepala desa dalam implementasi pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan air tawar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan implementasi yang dilakukan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan budidaya ikan air tawar adalah pihak desa memberikan sugesti/sebuah keyakinan kepada peternak ikan air tawar bahwa harus yakin dalam diri sendiri jika budidaya ikan akan berhasil sesuai yang diharapkan serta pihak desa memberikan penyuluhan/pelatihan kepada masyarakat peternak ikan agar mereka mempunyai wawasan ilmu pengetahuan dalam membudidayakan ikan air tawar dan memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai kolam ikan air tawar. Persamaan dalam penelitian ini ada pada subjek yang diambil, yaitu pemberdayaan pada petani ikan air tawar. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti ada di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

Bayu Dwi Prasetya, dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Air Tawar (Studi Kasus di

---

<sup>57</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung, “*Teknik Pembesaran Ikan Patin*” dalam [dkp.tulungagung.go.id/index.php/tips-budidaya/29-teknik-pembesaran-ikan-patin](http://dkp.tulungagung.go.id/index.php/tips-budidaya/29-teknik-pembesaran-ikan-patin) diakses pada 30 November 2019

<sup>58</sup> Perdana Kesuma, *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan*, (Medan: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Lestari Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga).<sup>59</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan air tawar meliputi proses pemberdayaan, implementasi kegiatan, faktor pendukung, penghambat dan dampaknya bagi masyarakat melalui budidaya ikan air tawar di POKDAKAN Mina Lestari di Desa Brobot Bojongsari Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan POKDAKAN Mina Lestari meliputi penyadaran, pengkapasitasan melalui pembinaan pengetahuan dan ketrampilan, dan pendayaan; implementasi kegiatan kelompok Mina Lestari meliputi pertemuan rutin, arisan, simpan pinjam, membayar wajib kas, pembesaran ikan, pembibitan, pemanenan, studi banding ke kelompok pembudidaya lain, gotong royong/kerja bakti, ronda, pembagian kerja dan administrasi kerja; dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan; serta dampak dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini yang utama yaitu menambah penghasilan, memberikan motivasi usaha dan membuka lapangan kerja baru. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan pada petani ikan air tawar. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti ada di Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Amalia Probowari, dengan judul penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Keramba Budidaya Ikan di Desa Ngargosari Sumberlawang Sragen”.<sup>60</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap proses dan strategi pemberdayaan ekonomi warga Desa Ngargosari melalui pemanfaatan keramba budidaya ikan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Metode penelitian yang digunakan yaitu

---

<sup>59</sup> Bayu Dwi Prasetya, *Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Ikan Air Tawar (Studi Kasus di Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Lestari Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

<sup>60</sup> Amalia Probowari, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Keramba Budidaya Ikan di Desa Ngargosari Sumberlawang Sragen*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam proses dan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Ngargosari melalui pengembangan budidaya ikan keramba dengan cara memanfaatkan lahan Waduk Kedungombo memberikan kesempatan bagi warga Ngargosari untuk membuka lapangan pekerjaan untuk usaha perikanan dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha budidaya ikan. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti ada di Desa Ngargosari Sumberlawang Sragen.

Ajeng Dwi Rahma Putri, dengan judul penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Karamba Ikan di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta”.<sup>61</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan yang diberikan oleh pengusaha karamba ikan terhadap karyawan dan untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh oleh karyawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggambarkan atau melukiskan kondisi suatu objek. Hasil dari penelitian yaitu pemberdayaan ekonomi melalui usaha karamba ikan di Waduk Jatiluhur sangat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan para pekerja harian yang kini sudah memiliki rumah dan usaha sendiri. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha budidaya ikan. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti ada di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Linda Rachmawati, dengan judul penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Soka Makmur di Dusun Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman”.<sup>62</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) Mina Soka Makmur di Dusun Kadisoka,

---

<sup>61</sup> Ajeng Dwi Rahma Putri, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Karamba Ikan di Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

<sup>62</sup> Linda Rachmawati, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Soka Makmur di Dusun Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

Purwomartani, Kalasan, Sleman dan mendeskripsikan tentang dampak Kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) Mina Soka Makmur dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Dusun Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan KPI Mina Soka Makmur terdiri dari beberapa macam strategi serta pemberdayaan ekonomi yang ada di KPI Mina Soka Makmur dapat berdampak positif maupun negatif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti ada di Dusun Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman.